



Lim Kheng Sia
Dewan Daerah Fakta

Harus Pro Rakyat

HARUS diakui bahwa APBD Kalbar tahun anggaran 2019 masih jauh dari prorakyat, karena dari total APBD Rp5,9 triliun, belanja langsung terlihat lebih kecil porsi sebesar Rp2,7 triliun atau 45,73 persen dibanding belanja tidak langsung yang mencapai Rp3.2 triliun atau 54,27 persen.

Dengan besaran belanja tidak langsung dari belanja langsung pada APBD Kalbar tahun anggaran 2019 tersebut, jelas bertolak belakang dengan komitmen Pemprov Kalbar dalam mewujudkan transparansi anggaran dan mempercepat pembangunan.

Bagaimana mau mempercepat pembangunan, sementara anggaran dalam APBD saja lebih besar untuk belanja pegawai.

Untuk itu, pada APBD tahun 2020 mendatang ini bisa menjadi catatan bagi Pemprov Kalbar, kalau pun sudah terlambat untuk mengubahnya, paling tidak pada APBD perubahan tahun 2020 mendatang, bisa di-

perbaiki.

Besarnya anggaran belanja tidak langsung menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kalbar masih belum bisa mengutamakan program yang menyentuh langsung untuk masyarakat.

OPD Kalbar masih belum serius dalam mengkaji program kerja mereka untuk menyentuh langsung masyarakat dan justru program yang dibuat lebih diarahkan untuk menyejahterakan OPD itu sendiri.

Dari total belanja langsung yang ada pada APBD 2019, juga tidak sepenuhnya digunakan untuk program pembangunan, karena jika ditelaah lebih jauh, banyak program OPD yang disisipkan dalam program belanja langsung.

Kita harapkan, ke depan hal-hal seperti ini bisa dicegah, dan kami minta Gubernur Kalbar untuk bisa lebih kritis dalam menelaah APBD Kalbar ke depan, terutama program-program yang ada pada tiap-tiap OPD. **(dho)**